



Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Oleh :

M. Ariyan Syahrial, M.Pd,
Isni Kartika Larasati, S.Pd., M.Si,
Ary Wibawa, S.AP., M.AP,
Hairul Ikhwan, S.Hut,
Yunita Anggeriana, S.Hut.
Dicky Maulana, S.Kom.
Muhammad Rifqian Nafi, A.Md.T.

PENDAHULUAN

Kualitas kebijakan publik merupakan determinan utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks reformasi birokrasi, pemerintah dituntut untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengembangkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen untuk mengukur dan mendorong peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). IKK dirancang untuk menilai kualitas kebijakan dari aspek proses hingga dampaknya terhadap pembangunan strategis.

Implementasi IKK menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan kualitas kebijakan publik sebagai salah satu indikator kinerja utama pemerintahan.

Di tingkat daerah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025 dan menunjukkan capaian yang signifikan. Namun demikian, hasil evaluasi mengindikasikan adanya sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal perencanaan kebijakan, evaluasi keberlanjutan, dan transparansi publik..

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

- 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemamirian bangsa melalui esensialitas pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kesempatan.
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8 Memperkuat penyelarasan kebijakan yang harmonis dengan lingkungan, etika, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Secara garis besar, IKK merupakan perwujudan Asta Cita ke-7 dari Visi Misi Presiden, yakni **memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.**

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

Ringkasan

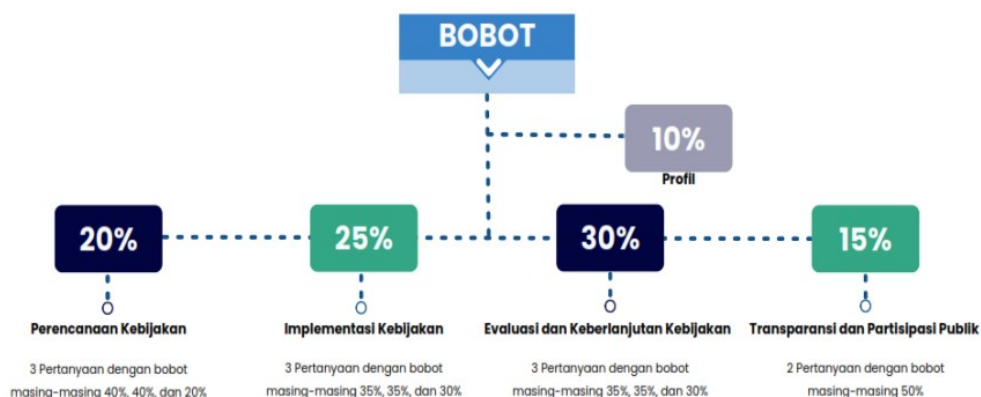
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen strategis dalam mengukur dan mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy making*) sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan mayoritas instansi mencapai kualitas kebijakan minimal kategori “Baik”, namun capaian nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan implementasi.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian IKK kategori “Unggul” pada tahun 2025. Meskipun demikian, hasil evaluasi mengidentifikasi sejumlah kelemahan pada dimensi perencanaan kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, terdapat kesenjangan antara nilai *self-assessment* dan hasil verifikasi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman indikator serta penguatan bukti dukung.

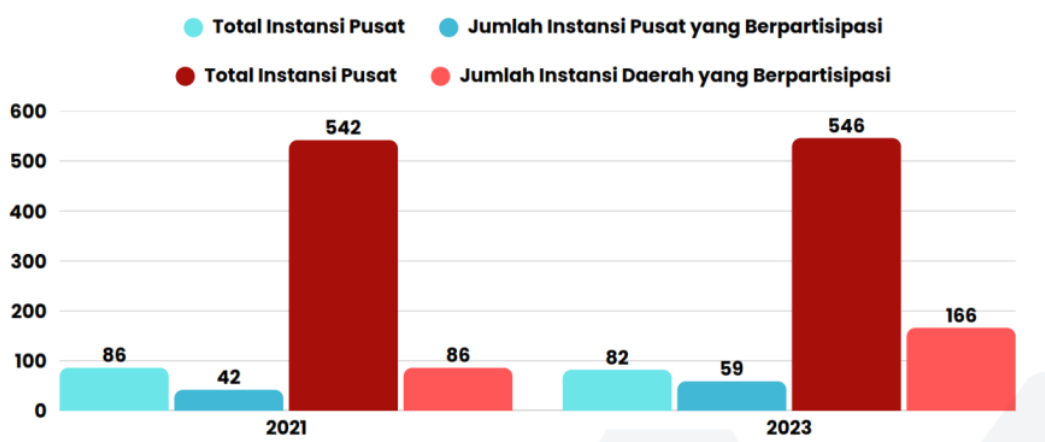
Rekomendasi utama yang diusulkan meliputi integrasi IKK sebagai budaya kerja organisasi, optimalisasi peran analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan, penguatan perencanaan berbasis data dan analisis dampak, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan implementasi yang konsisten, IKK diharapkan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi administratif, tetapi juga menjadi katalis transformasi kebijakan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

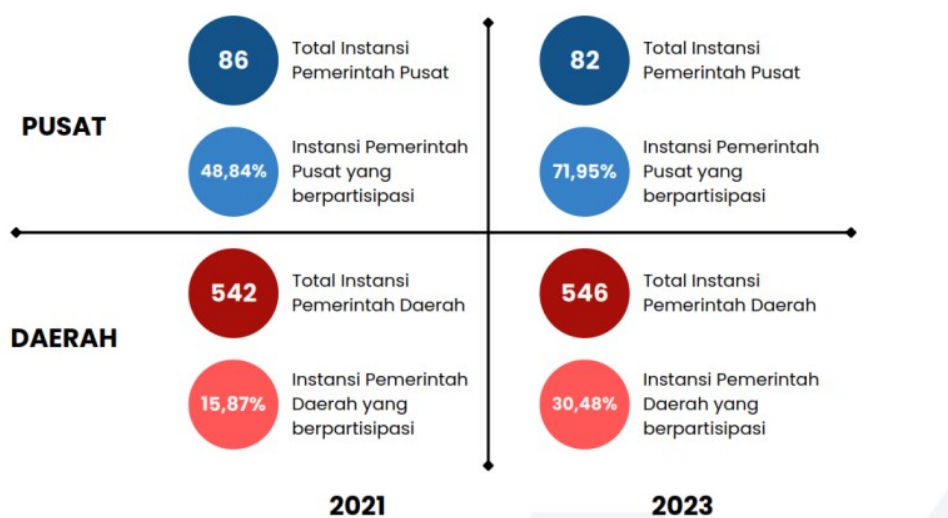
PEMBOBOTAN INSTRUMEN IKK



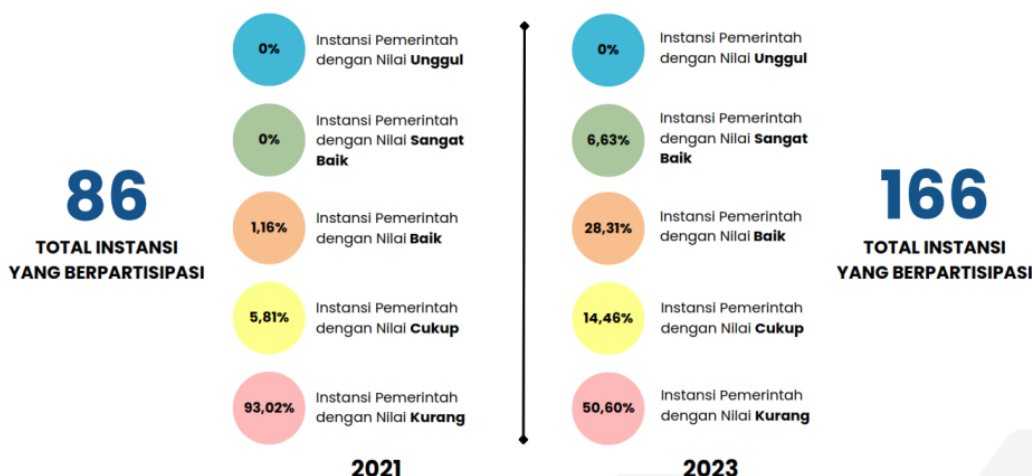
Jumlah Instansi Pemerintah yang Berpartisipasi dalam Pengukuran IKK Tahun 2021 dan 2023



Tingkat Partisipasi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran IKK Tahun 2021 dan 2023



Perolehan Nilai Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan 2023



A	B	Q	R	S	T	U	V	W
No	Instansi	Skor 2021	Skor 2023	Skor 2024	Kehadiran Sosialisasi	Kehadiran Kick-off	Konfirmasi (pesan/telepon)	Registrasi
458	Provinsi Kalimantan Selatan				Hadir	Tidak Hadir	Respon	Sudah
459	Kabupaten Balangan				Hadir	Hadir	Respon	Sudah
460	Kabupaten Banjar				Hadir	Hadir	Belum	Belum
461	Kabupaten Barito Kuala				Tidak Hadir	Hadir	Respon	Sudah
462	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	16,71	67,03	67,03	Hadir	Hadir	Respon	Sudah
463	Kabupaten Hulu Sungai Tengah				Tidak Hadir	Tidak Hadir	Respon	Belum
464	Kabupaten Hulu Sungai Utara				Hadir	Hadir	Respon	Sudah
465	Kabupaten Kotabaru				Hadir	Tidak Hadir	Respon	Sudah
466	Kabupaten Tabalong				Hadir	Hadir	Respon	Sudah
467	Kabupaten Tanah Bumbu				Hadir	Hadir	Respon	Sudah
468	Kabupaten Tanah Laut				Hadir	Tidak Hadir	Respon	Sudah
469	Kabupaten Tapin				Hadir	Hadir	Belum	Belum
470	Kota Banjarbaru				Hadir	Hadir	Respon	Sudah
471	Kota Banjarmasin				Tidak Hadir	Hadir	Respon	Sudah

TINJAUAN KEBIJAKAN

Penguatan kualitas kebijakan publik di Indonesia merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan strategis yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Salah satu landasan utama adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus difokuskan pada peningkatan kualitas kebijakan publik, penguatan sistem akuntabilitas, serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target bahwa pada tahun 2029, sebanyak 85% instansi pemerintah diharapkan mencapai kualitas kebijakan minimal kategori “Baik”.

TARGET 2025



TARGET 2029



Instansi Pemerintah dengan Nilai IKK Minimal **Baik**



Selain itu, reformasi birokrasi juga merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, peningkatan kualitas kebijakan menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Konsep dan Pendekatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah secara komprehensif, dengan menitikberatkan pada dampak kebijakan terhadap pembangunan. IKK menggunakan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*), yang mengharuskan setiap kebijakan didasarkan pada data, analisis, serta evaluasi yang sistematis.

Tujuan utama IKK adalah mendorong instansi pemerintah untuk:

- Meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan
- Memastikan efektivitas implementasi kebijakan
- Menjamin keberlanjutan dan dampak kebijakan
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik

Pengukuran IKK dilakukan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh instansi pemerintah, yang kemudian diverifikasi oleh pihak independen. Model ini bertujuan untuk mendorong internalisasi praktik kebijakan yang berkualitas sekaligus menjaga objektivitas hasil penilaian.

Dimensi dan Indikator Pengukuran IKK

IKK mengukur kualitas kebijakan melalui satu profil dan empat dimensi utama, yaitu:

1. Profil

Dimensi ini mengukur keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam proses pengukuran kualitas kebijakan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan disusun berdasarkan analisis yang mendalam dan berbasis keilmuan.

2. Perencanaan Kebijakan

Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan disusun berdasarkan:

- Data dan informasi yang valid
- Keterlibatan pemangku kepentingan
- Analisis dampak sebelum implementasi

3. Implementasi Kebijakan

Dimensi ini menilai:

- Kejelasan koordinasi dan komunikasi antar pelaksana
- Efektivitas pelaksanaan kebijakan
- Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas

4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Dimensi ini menilai:

- Adanya evaluasi kebijakan secara berkala
- Dampak kebijakan yang terukur
- Keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

Dimensi ini menilai:

- Akses informasi kebijakan bagi publik
- Mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan



Dari sisi pembobotan, dimensi evaluasi dan keberlanjutan memiliki bobot terbesar, yang menunjukkan pentingnya aspek dampak jangka panjang dalam kebijakan publik.

Proses dan Mekanisme Pengukuran IKK

Pengukuran IKK dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu:

1. Sosialisasi dan persiapan pengukuran
2. Pengajuan kebijakan strategis oleh instansi pemerintah
3. Pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*)
4. Verifikasi oleh tim independen
5. Pemberian umpan balik (*feedback*)
6. Penetapan nilai akhir dan penganugerahan

Setiap instansi diwajibkan mengajukan **tiga kebijakan strategis** sebagai objek pengukuran dengan kriteria:

- Telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam tiga tahun terakhir
- Memiliki dampak langsung terhadap masyarakat
- Mendukung pembangunan berkelanjutan

Implikasi Kebijakan

Tinjauan kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKK sangat bergantung pada:

- Komitmen pimpinan instansi
- Kapasitas SDM, khususnya analis kebijakan
- Ketersediaan data dan sistem informasi
- Partisipasi aktif masyarakat

Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, IKK berpotensi hanya menjadi instrumen administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan.